

BAB II

2.1 Sejarah Singkat Instansi

2.1.1 Logo Instansi



(sumber data internal Kementerian Hukum dan HAM)

Gambar 2. 1 Logo Kemenkumham

2.1.2 Profil Instansi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang menteri sejak 24 Oktober 2014 lalu yang bernama Yasonna Laoly ini bertanggung jawab dan berada dibawah naungan Presiden Kemenkumham beberapa kali sudah mengalami pergantian nama yaitu : “Departemen Kehakiman” (tahun 1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang Undangan” (tahun 1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (tahun 2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (tahun 2004-2009), dan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (tahun 2009-sekarang). Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ole Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta, menjadi tonggak sejarah diawalinya

perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Sebagai kelengkapan organ pemerintah maka pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia mengukuhkan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohamad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya menetapkan pembentukan 12 (dua belas) Departemen di Republik Indonesia termasuk di dalamnya Departemen Kehakiman, yang sekaligus pada waktu itu diumumkan adanya Pembentukan Kabinet Pertama, dan untuk Departemen Kehakiman Republik Indonesia diangkatlah Prof. DR. MR. SUPOMO sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama. Adapun tugas yang diemban oleh Departemen kehakiman mencakup hal-hal mengenai Pengadilan, Penjara, Kejaksaan dan Kadaster. Seiring perjalanan waktu dan adanya dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, tugas yang diemban oleh, Departemen Kehakiman mengalami penyesuaian, demikian juga terkait dengan nomenklaturya. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999 dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi, menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Pada tahun 2000 kembali terjadi perubahan nomenklatur menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen. Pada saat ini tugas yang dipikul oleh jajaran menjadi semakin heterogen karena tambahan tugas di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M.04/PR.07.10 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umm dan Peradilan Tata

Usaha Negara dilepaskan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan bergabung di lingkungan Mahkamah Agung, hal ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang Merdeka. Melalui Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara RI kembali terjadi perubahan nomenklatur menjadi Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan pada akhirnya melalui Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Hari Dharma Karyadhika ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 September 1985 Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 yang ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama adalah bentuk dari Departemen Kehakiman " *Holding Company* " yang berubah menjadi " *Integrated Type* ". Pada awalnya Kanwil Kemenkumham Riau memiliki wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau Kepulauan, namun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Propinsi Kepulauan Riau, Irian Jaya Barat dan Sulawesi Barat, maka secara langsung Kepulauan Riau sudah tidak tergabung lagi kedalam wilayah tugas Kanwil Departemen Hukum dan HAM Riau serta secara resmi ditandai dengan adanya serah terima tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2006 di Pekanbaru.

Demikian sejarah singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, semoga jaya selamanya, abadi mengiringi sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia.

2.1.3 Visi Kemenkumham Riau :

Visi :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

2.1.4 Misi Kemenkumham Riau :

Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

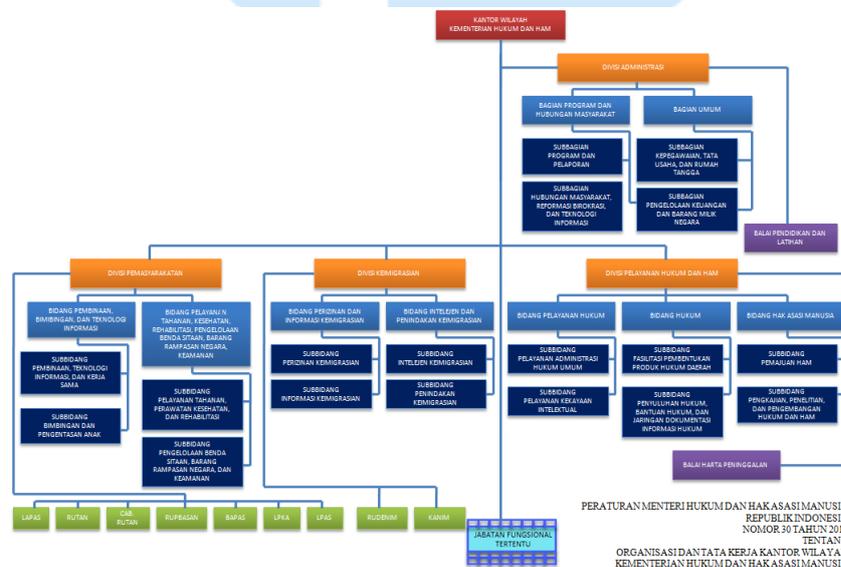
2.2 Tempat, Kontak dan Kanal Kemenkumham Riau :

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau berada di Jl. Jendral Sudirman No.233, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111. Kanwil Kemenkumham Riau dapat

dihubungi melalui telepon di (0761) 23846 atau bagian Informasi dan Pengaduan 0821-7171-4161. Dalam penggunaan media sosial sebagai wadah dan penghubung, Kemenkumham Riau memiliki berbagai kanal yang ditujukan sesuai dengan setiap karakteristik konten secara umum sebagai berikut.

- a. Laman : <https://riau.kemenkumham.go.id/>
- b. Youtube : Kanwil Kemenkumham Riau
- c. Instagram : kanwilkemenkumhamriau
- d. Facebook : Kanwil Kemenkumham Riau

2.3 Struktur Organisasi Instansi



(sumber data internal Kementerian Hukum dan HAM)

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Instansi

Sama seperti perusahaan/instansi lainnya, Kementerian

Hukum dan HAM Riau memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Penulis berada diruang lingkup Divisi Administrasi Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, berikut penjelasannya :

a. Divisi Administrasi

Divisi administrasi merupakan divisi yang menangani bidang fasilitatif, penyelenggaraan fungsi koordinasi kegiatan dilingkungan kantor wilayah, pengordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, melaksanakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga serta bidang kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi. Tak hanya itu, divisi administrasi juga menjalankan tugas kantor wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi pada lingkungan kantor wilayah. Dibawah kepala divisi administrasi terdapat kepala bagian program dan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai pemimpin dan mendistribusikan petunjuk pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kemudian juga mengumpulkan data serta informasi, permasalahan, peraturan, perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dan dokumentasi serta hubungan masyarakat dan media. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bagian Hubungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya.

Sementara untuk tugas kepala Sub Bagian Hubungan

Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi yaitu meakukan monitoring dan evaluasi pada tugas dan fungsi Humas, RB dan TI serta memberikan penguatan dan sosialisasi kepada jajarannya mengenai pentingnya Reformasi Birokrasi yang erat kaitannya dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lalu sosialisasi mengenai pengumpulan laporan pada aplikasi *e-rb*. Tak sampai disitu, kendala dan program unggulan apa saja yang ada pada Kantor Wilayah Riau merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kassubag Humas, RB dan TI.

